

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAGRI NOMOR 72 TAHUN 2022 TENTANG KTP DIGITAL DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL DI KABUPATEN BANJAR**

Siti Rokayyah<sup>1</sup>, Fika Fibriyanita<sup>2</sup>, Beni Akhmad<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska, NPM. 19120150

<sup>2</sup>Ilmu Administrasi Publik, Fisip, Uniska, NIDN. 11 2102 8803

<sup>3</sup>Ilmu Administrasi Publik, Uniska, NIDN. 11 0908 9201

Email: [sitirokayyah.app@gmail.com](mailto:sitirokayyah.app@gmail.com), [fika.fsp@gmail.com](mailto:fika.fsp@gmail.com), [beniap03@gmail.com](mailto:beniap03@gmail.com)

## **ABSTRAK**

SITI ROKAYYAH, NPM 19120150, Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Ktp Digital Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Banjar, Bimbingan Fika Fibriyanita sebagai Pembimbing Utama dan Beni Akhmad sebagai Co Pembimbing.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi dan untuk mengetahui kendala apa saja dalam Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Ktp Digital Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Di Kabupaten Banjar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan, Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang KTP Digital di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar sudah berjalan, akan tetapi masih ada beberapa kendala yang dihadapi seperti kurangnya informasi terkait KTP digital, sedangkan untuk fasilitas atau sarana dan prasarana masih belum memadai seperti alat komunikasi yang harus dimiliki oleh setiap orang yang akan mengajukan penginputan KTP Digital serta jaringan internet yang masih kurang untuk beberapa daerah yang sulit untuk dijangkau akses internet. Oleh karena itu, Disdukcapil Kab. Banjar perlu meningkatkan sosialisasi dan menyediakan dukungan teknis yang memadai untuk membantu masyarakat dalam menggunakan aplikasi KTP Digital.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 sudah berjalan, akan tetapi belum maksimal karena dilihat dari kendala yang terjadi sehingga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masih belum ternilai baik.

**Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Kebijakan KTP Digital.**

## ***ABSTRACT***

SITI ROKAYYAH, NPM 19120150, Implementation of Minister of Home Affairs Policy Number 72 of 2022 Concerning Digital ID Cards in Population Administration Services at the Population and Civil Registration Service in Banjar Regency, Guidance of Fika Fibriyanita as Main Advisor and Beni Akhmad as Co Advisor.

The purpose of this study is to find out the implementation and to find out what are the obstacles in implementing the Permendagri Policy Number 72 of 2022 concerning Digital ID Cards in Population Administration Services at the Population and Civil Registry Service in Banjar Regency.

This study uses a qualitative approach with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Meanwhile, data analysis techniques used data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the Implementation of the Minister of Home Affairs Policy Number 72 of 2022 concerning Digital KTP at the Population and Civil Registry Office of Banjar Regency has been running, but there are still a number of obstacles encountered such as a lack of information regarding digital KTP, while facilities or infrastructure are still not Adequate such as a communication tool that must be owned by everyone who will apply for input of a Digital KTP and an internet network that is still lacking for some areas that are difficult to reach with internet access. Therefore, Disdukcapil Kab. Banjar needs to improve socialization and provide adequate technical support to assist the community in using the Digital KTP application.

The conclusion of this study shows that the Implementation of the Permendagri Policy Number 72 of 2022 has been running, but it has not been optimal because seen from the constraints that have occurred so that meeting the needs of the community is still not of good value.

**Keywords** : **Policy Implementation, Digital ID Policy.**

## REFERENSI

### Buku

- Arianto, (2020). *Kualitas Pelayanan Publik*. Penerbit Erlangga
- Banjar, K. (2022). *Buku Pedoman Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar*. Banjar: Dissukcapil.
- Dody, Setyawan. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Goerge Edwadr III. Model Implementasi. Caps Malang.
- Sobirin, & Udin B. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sri, Maulidiah. (2014). *Pelayanan Publik*. CAPS : Jatinangor

### Jurnal

- Irfadat, T., Ardiansyah, N., & Haeril, H. (2021). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E- Ktp) Di Kantor Camat Raba Kota Bima. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 9-16.
- Banjar, K. (2022). *Buku Pedoman Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar*. Banjar: Dissukcapil.
- Indonesia, P. M. (2022). *Permendagri NO 72 Tahun 2022 tentang KTP Digital*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.
- Keban, Y. T., & Wartono, B. (2020). *Administrasi Publik*. Jakarta: Kencana.
- Keban, Y. T., & Wijayanto, A. (2019). *Pendidikan Kependudukan*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Permendagri. (2022). *Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang KTP Digital*.
- Pramuditha, R., & Agustina, I. (2022). Persepsi Masyarakat Pengguna Atas Kualitas Pelayanan E-KTP Pada Kecamatan Bogor Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(1), 884-901.
- Permatasari, Y. G. (2014). *Implementasi Pelayanan atas Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Studi di Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Purwanti, T. (2018). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Administrasi*

Kependudukan. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 7(1), 59-67.

Sihotang, A., & Sipayung, S. (2019). *Administrasi Kependudukan*. Medan: Percetakan Bina Utama.

Suprpto, S. (2020). *Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gaya Media.

Tri Purwanti, Ren Suharyadi. (2018). *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik. Konsep Administrasi Kependudukan*. Volume 7 No. 1

### **Undang-Undang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Indonesia, P. M. (2022). *Permendagri NO 72 Tahun 2022 tentang KTP Digital*. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia.

### **Website**

Aplikasi KTP Digital : Google Play atau App Store

Laman web Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar : <https://Disdukcapil.banjarkab.go.id>.